BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi bergerak dan disebarkan sangat cepat dalam era digital yang semakin canggih, terutama dalam media sosial. Salah satu dampak perkembangan ini adalah maraknya hoaks atau informasi palsu yang sering kali menyesatkan masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi dalam melestarikan demokrasi yang aman adalah hoaks, terutama dalam konteks pemilu. Pada Pemilu Presiden RI 2024 ini, pemilih pemula— mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya— menjadi salah satu target sasaran penyebaran hoaks di media sosial. Dan TikTok, aplikasi media sosial yang populer dalam kalangan anak muda, menjadi salah satu tempat yang cocok dalam menyebarkan informasi hoaks.

Menurut UNESCO, hoaks adalah jenis propaganda yang biasanya menarik perhatian terkadang bersifat sensasional, berlebihan, atau menipu. UNESCO mencatat bahwa frasa "hoaks" mungkin bermasalah dan dipolitisasi dan menyoroti perlunya memahami konteks dan maksud di balik penyampaian informasi. UNESCO menyarankan untuk mengacu pada berbagai bentuk gangguan informasi, seperti sindiran, parodi, judul clickbait, teks yang menipu, gambar, statistik, materi palsu, dan konten yang diubah, dengan menggunakan frasa misinformasi dan disinformasi (Ireton & Posetti, 2018).

Dalam Siaran Pers No. 03/HM/KOMINFO/01/2024 yang diterbitkan tanggal 3 Januari 2024. Sehubungan dengan Pemilu Serentak 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menemukan 203 isu hoaks. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menemukan 2.882 konten di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snack Video, dan platform digital lainnya. 1.399 item telah disarankan untuk dihapus atau ditindaklanjuti oleh kementerian. 1.399 dari 2.882 pengajuan penghapusan telah diselesaikan, sementara 1.483 sedang menunggu tindak lanjut. Pemerintah memproyeksikan akan ada 189 kekhawatiran hoaks pada pemilu 2024 pada tahun 2023— peningkatan yang signifikan dari bulan November hingga Desember tahun sebelumnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika secara aktif mendorong semua orang untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan digital yang aman selama pemilu, terutama para kandidat. Mereka menginginkan kerja sama untuk menghentikan masalah hoaks dan menyediakan lingkungan online yang aman dalam Pemilu 2024 (Kominfo, 2024).

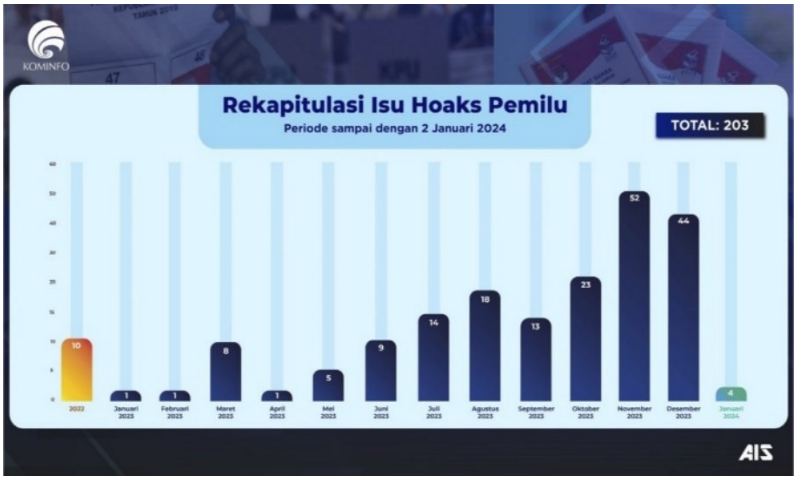

Gambar 1. Kominfo statistik penanganan hoaks pemilu 1

Gambar 1. diatas merupakan rekapitulasi isu hoaks pemilu dari tahun 2022 sampai dengan 2 Januari 2024. Dalam tahun 2022 terdapat 10 isu hoaks pemilu, Januari 2023 terdapat 1 isu hoaks pemilu, Februari 2023 terdapat 1 isu hoaks pemilu, Maret 2023 terdapat 8 isu hoaks pemilu, April 2023 terdapat 1 isu hoaks pemilu, Mei 2023 terdapat 5 isu hoaks pemilu, Juni 2023 terdapat 9 isu hoaks pemilu, Juli 2023 terdapat 14 isu hoaks pemilu, Agustus 2023 terdapat 18 isu hoaks pemilu, September 2023 terdapat 13 isu hoaks pemilu, Oktober 2023 terdapat 23 isu hoaks pemilu, November 2023 terdapat 52 isu hoaks pemilu, Desember 2023 terdapat 44 isu hoaks pemilu, dan sampai 2 Januari 2024 terdapat 4 isu hoaks pemilu. Secara keseluruhan sebanyak 203 isu hoaks pemilu.

	Total	Diajukan	Tindak Lanjut (Take Down)	Sedang Ditindaklanjuti
Facebook	1.325	1.325	1.015	310
Twitter	947	947	10	937
Instagram	198	198	148	50
TikTok	342	342	198	144
Snack Video	36	36	16	20
Youtube	34	34	12	22
Total Keseluruhan	2.882	2.882	1.399	1.483

Gambar 2. Kominfo statistik penanganan hoaks pemilu 2

Gambar 2. diatas merupakan sebaran isu hoaks pemilu sampai dengan 2 Januari 2024. Dimana sebanyak 2.882 total sebaran pengajuan takedown, dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 1.399 pengajuan. Jika kita perhatikan menurut aplikasi TikTok

total yang diajukan untuk di takedown sebanyak 342 pengajuan, yang ditindaklanjuti sebanyak 198 pengajuan, dan yang sedang ditindaklanjuti sebanyak 144 pengajuan.

Dengan banyaknya isu hoaks yang beredar, hoaks sendiri dapat digunakan untuk mempengaruhi opini masyarakat terhadap kandidat tertentu atau bahkan keseluruhan proses pemilu dalam konteks pemilu presiden. Hoaks yang tersebar luas berpotensi melemahkan institusi demokrasi, membahayakan stabilitas sistem politik, dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Hoaks dapat berdampak negatif terhadap individu maupun masyarakat. Hoaks mempunyai kekuatan untuk menyesatkan, menimbulkan rasa takut, dan merugikan reputasi seseorang atau suatu kelompok. Selain itu, baik dalam bidang politik, kesehatan, atau keuangan, hoaks dapat memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi fenomena hoaks pada Pemilu Presiden 2024, kemampuan literasi informasi menjadi hal yang sangat penting. Kapasitas memperoleh, berbagi, dan menggunakan informasi secara bijaksana merupakan salah satu komponen kemampuan literasi informasi. Menurut Paul Zukowski (1974) “information literates” adalah mereka yang telah menerima pelatihan dalam menggunakan sumber informasi secara efektif dalam pekerjaan mereka. Dan “Kemampuan untuk mengenali, menemukan, menilai, dan menggunakan informasi secara efektif untuk isu atau permasalahan yang dihadapi ketika diperlukan” dikenal dengan istilah literasi informasi. (Elmborg, 2022)

Kemampuan literasi informasi melibatkan pemahaman dan penilaian konten terkait hoaks, yang dapat dipengaruhi oleh perasaan dan bias kognitif masyarakat. Hal ini melibatkan verifikasi keaslian informasi dengan mencari sumber yang dapat dipercaya, membandingkannya dengan sumber lain dan memastikan materi tersebut telah divalidasi oleh organisasi atau spesialis yang dihormati. Hal ini membantu mencegah penyebaran hoaks baru dan memastikan pengambilan keputusan yang akurat. Dalam konteks hoaks, penting bagi masyarakat untuk mengidentifikasi, menyebarkan, dan menyangkal hoaks dengan menggunakan logika dan bukti. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perlawanan terhadap hoaks. Pemahaman yang lebih baik mengenai kemampuan literasi informasi pada pemilu presiden 2024 dapat membantu inisiatif strategis untuk meningkatkan kesadaran, mengajarkan pengenalan masyarakat, dan mendorong penggunaan informasi yang akurat.

Mereka yang pertama kali memberikan suara dalam suatu pemilu disebut pemilih pemula. Pemilih Pemula menurut Pasal 1 ayat 28 PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa orang yang berumur 17 tahun ke atas, yang sudah menikah atau pernah menikah, atau pernah menikah dianggap sebagai pemilih. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun pada saat pemilu dan berhak memilih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu, dianggap sebagai pemilih pemula.

Sederhananya, pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali ikut pemilu. Sebagian besar pemilih pemula tampak tak pasti dan memiliki perspektif dinamis terhadap politik. Salah satu indikator antara lain sosial budaya, pendidikan, dan kondisi kehidupan menjadi beberapa penyebabnya. Calon kandidat dan partai politik juga menarik sebanyak mungkin pemilih pemula sepanjang siklus pemilu. Pemilih pemula mempunyai risiko mudah terpengaruh jika mereka kurang memahami politik.(Oktama et al., 2023)

Penelitian ini dilakukan untuk melihat kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan literasi informasi bagi pemilih pemula, khususnya dalam menangani hoaks di media sosial pemilu presiden RI pada tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana persepsi pemilih pemula tentang penyebaran hoaks pemilu presiden di TikTok. Penelitian ini juga berfokus pada popularitas platform ini di kalangan generasi muda Indonesia dan relevansinya dalam konteks pemilu saat ini.

Jika dikaitkan dalam konteks tinjauan Islam tentang pencegahan hoaks dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 (Masfufah et al., 2020):

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٦

Artinya:

6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. (QS. Hujurat: 6)

Ayat di atas menekankan pentingnya verifikasi kebenaran berita, mempertimbangkan fakta dan keandalan sumber, serta mengandalkan akal dan pengetahuan dalam interaksi sosial. Hal ini juga menekankan pentingnya mutawatir, atau pengakuan para ahli atas informasi palsu, dan perlunya ketergantungan yang hati-hati pada sumber berita. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati tentang

informasi apa saja yang kita dapatkan. Maka kita perlu memeriksanya kembali dengan ini kita dapat menghindari hoaks. (Masfufah et al., 2020)

Tujuan dari analisis persepsi kemampuan literasi informasi tentang hoaks dalam pemilu presiden 2024 adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan pemilih pemula dalam membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar, perlu dilakukan analisis persepsi kemampuan literasi informasi terkait hoaks pada Pilpres 2024. Hal ini penting karena penyebaran hoaks berpotensi mempengaruhi keputusan pemilih dan proses demokrasi. Oleh karena itu, inisiatif untuk mendorong literasi informasi diperlukan untuk menghentikan penyebaran hoaks dan menjamin partisipasi pemilih pemula yang terinformasi dalam pemilu presiden 2024. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa baik pemilih pemula memahami hoaks dalam pemilu presiden 2024.

1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang penelitian di atas, berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat di identifikasikan:

a. Bagaimana persepsi kemampuan literasi informasi pemilih pemula pada pemilu presiden RI Tahun 2024 tentang hoaks di media sosial tiktok?
b. Bagaimana tinjauan islam dalam analisis persepsi kemampuan literasi informasi seseorang dalam menanggapi hoaks?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Menganalisis persepsi kemampuan literasi informasi pemilih dalam menanggapi hoaks tentang pemilu presiden 2024 di media sosial tiktok.
b. Menganalisis tinjauan islam untuk melihat persepsi kemampuan literasi informasi seseorang dalam menanggapi hoaks.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian ini adalah:

a. Sehubungan dengan pemilihan presiden tahun 2024, menyediakan data yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah atau organisasi terkait untuk meningkatkan efektivitas inisiatif untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang hoaks dan literasi informasi.

b. Memberikan landasan yang kokoh dan dapat meningkatkan kemampuan literasi informasi pemilih pemula dalam memerangi berita palsu terkait Pilpres 2024.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi untuk pengguna media sosial TikTok dan juga yang merupakan pemilih pemula pemilu presiden RI 2024. Pemilih pemula merupakan individu berusia 17 tahun ke atas, baik menikah maupun belum, yang dianggap pemula dalam pemilu, Sebagai salah satu kelompok yang mempunyai banyak suara dalam pemilu ini dan terpapar banyaknya informasi melalui media sosial, peneliti ingin melihat persepsi kemampuan literasi informasi mereka tentang hoaks pemilu presiden RI 2024 dalam media sosial TikTok.